

## **JURNAL**

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Diajukan oleh :**

**CHLAUDIUS ANGGARA**

<b>NPM</b>	<b>: 110510523</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN  
PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Diajukan oleh :

CHLAUDIUS ANGGARA

NPM : 110510523  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Pada tanggal 29. 7. 2016

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PELANGGARAN PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Chlaudius Anggara, CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

*This essay discuss about law enforcement by the Yogyakarta Police department for violation of Article 134 letter G in Indonesian law Number 22 of 2009 on traffic and road transport. Which explained that the motorcycle convoy group is not classified as Convoy Criteria like it said in this article. However the this Convoy still operating their activities like doing convoy in the street and even they had permission and escorted by Yogyakarta Police which cause misunderstanding and inequity by the society. The purpose of this study is to know about the law enforcement of Yogyakarta Police Department to ensure the application this. The Problem Formulation in this research involve two formulation which is first is how Police Department react to the offenders of Article 134 letter G, and the second is what is the problems that Yogyakarta Police Department face to ensure the law enforcement of this law. This Legal Research conducted in Normative way. In this Research it can be concluded that first Yogyakarta Police Department only told the member this convoy Group about the terms before they doing the convoy, however if this terms is violated the police will take an action such as giving the offender administrative sanction and criminal sanction. The second is the problems that Yogyakarta Police face in this situations is the difficulties to determine the offender of this Article, because the member of this convoy were very numerous plus they had lack of coordination. The third is society still not understand the meaning of discretionary powers of police*

*Keyword : Law Enforcement, Convoy Group, Yogyakarta Police Department, Discretionary power*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.Latar Belakang**

Penggunaan jalan raya tidak hanya ditujukan bagi kendaraan bermotor, tetapi juga ditujukan bagi kendaraan tidak bermotor seperti becak,delman,sepeda maupun pejalan kaki. Dalam pasal 1 ayat (27) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Undang-

Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu Lintas. Akan tetapi, jalan raya tidak serta merta bebas digunakan oleh setiap pengguna jalan.

Adapun aturan-aturan Lalu Lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, yang diharapkan agar

tidak menimbulkan masalah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai masyarakat yang baik, kita pun harus mengetahui aturan-aturan apa saja yang wajib di taati, agar tidak terjadi kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Kerugian bagi diri sendiri itu seperti, dibebani biaya akibat terkena tilang oleh Petugas Kepolisian karena tidak melengkapi syarat berkendara, atau kecelakaan yang menyebabkan luka ringan atau pun luka berat, sehingga harus membayar ongkos-ongkos pengobatan di rumah sakit. Sedangkan kerugian bagi orang lain itu seperti halnya menabrak orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka ringan, berat atau bahkan mengalami kematian. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, kita pun harus selalu mengindahkan setiap aturan Lalu Lintas.

Contoh kecil yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat untuk mentaati Lalu Lintas adalah berhenti ketika lampu merah, dan ketika lampu berwarna hijau para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan. Pada keadaan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat benar-benar mentaati aturan Lalu Lintas. Namun bagaimana jika ada pengendara-pengendara motor yang melewati lampu merah sebelum lampu hijau muncul? lebih parahnya lagi, pengendara tersebut diijinkan melewati lampu merah, bahkan ada juga yang mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian. Pengendara-pengendara yang biasanya di kawal oleh Petugas Kepolisian dalam jumlah yang banyak itu disebut “konvoi”.

Dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa “konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu

menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia“. Pengaturan tersebut di tujukan kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, salah satunya yaitu konvoi. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu“ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Ada pun pihak-pihak yang mempunyai suatu kumpulan atau komunitas geng motor yang menganggap bahwa komunitas tersebut masuk dalam kategori konvoi. Dalam memudahkan terlaksananya konvoi tersebut, komunitas ini menggunakan bantuan Petugas Kepolisian seperti Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan juga Polisi Militer (PM) untuk mengawal rombongan mereka. Salah satu contohnya adalah konvoi yang dilakukan oleh para pecinta motor gede (moge) dengan rute Jalan Raya Yogya-Solo hingga ke Prambanan pada sabtu, tanggal 15 agustus 2015. Yang meresahkan pengguna jalan lain adalah pada saat rombongan tersebut diberikan jalan oleh Polisi Lalu Lintas untuk melewati lampu merah ketika lampu Translight dalam keadaan berwarna merah, sedangkan pengendara selain rombongan tersebut dihentikan, pengendara lain (bukan dalam rombongan moge) yang mendapatkan giliran lampu hijau, terpaksa harus menunggu sampai rombongan moge selesai melewati jalan tersebut.

Contoh lainnya lagi yaitu saat konvoi motor gede memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pada tanggal 17 mei 2008, yang menewaskan mantan politisi PDI Perjuangan

sekaligus Pemimpin touring Jalur Merah Putih (JMP) Sophan Sophiaan. Touring ini diikuti 273 motor Harley Davidson dengan rute keliling pulau Jawa. Dikabarkan bahwa Sophan Sophian meninggal dalam kecelakaan di Jembatan Desa Plangor, Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.<sup>1</sup> Dari kenyataan ini kita mengambil kesimpulan, masih diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar masyarakat mau mematuhi hukum.<sup>2</sup> Hal ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, terutama kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak Kepolisian) yang memiliki peranan penting dalam mengatur dan menertibkan pengguna jalan tanpa pandang bulu, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan.

Dalam hal Petugas Kepolisian memberikan pengawalan kepada para peserta konvoi ini, selain mengingat pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Petugas Kepolisian pun mempertimbangkannya dengan melihat pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Bunyi dari pasal 4 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- c. adanya pekerjaan jalan;
- d. adanya kecelakaan lalu lintas;
- e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
- f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
- g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
- h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Jika kita menelaah pasal 4 ayat (1) tersebut, maka yang menjadi sasaran utama bagi Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan konvoi adalah terkait dengan “keadaan tertentu”. Akan tetapi, sekalipun para peserta konvoi telah diberikan ijin untuk mendapatkan pengawalan dari Petugas Kepolisian berdasarkan pada “keadaan tertentu”, namun hal itu pun tidak terlepas dari yang namanya “kepentingan tertentu”.

Faktanya, keadaan tertentu yang dipertimbangkan oleh Petugas Kepolisian tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada pelaksanaan touring geng motor Harley Davidson ini, yang mana pengawalan yang seharusnya dilaksanakan pada hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yakni tanggal 17 agustus 2015, nyatanya

<sup>1</sup><http://www.ligagame.com/forum/index.php?action=printpage;topic=70316.0>

<sup>2</sup>Anton Tabah, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm 305.

pengawasan tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu pada tanggal 15 agustus 2015. Dari sini sudah jelas bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 telah disalah artikan oleh Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawasan kepada para peserta konvoi. Hal ini yang mengakibatkan krisis kepercayaan serta banyak kritikan dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian mengenai pengawasan konvoi tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tindakan Kepolisian terhadap Pelaku Pelanggaran pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apakah ada Kendala yang Dihadapi POLRI dalam menegakkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peserta konvoi?

## **B. METODE**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Sumber Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum untuk

memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yang dilakukan adalah mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman serta informasi tentang masalah penegakan hukum di wilayah Yogyakarta.

#### **b. Wawancara**

wawancara dilakukan dengan mewawancarai berbagai nara sumber yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **4. Narasumber**

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat umum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti penulis. Narasumber yang dimaksud adalah KAURBINOPS SAT LANTAS POLRESTA YOGYAKARTA IPTU Yoga Wahyu Permadi S.I.K M.H

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di POLRESTA Yogyakarta

### **6. Metode Analisis**

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan menganalisis faktor yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Tinjauan Umum Tentang POLRI**

#### **1. Pengertian POLRI**

Polri atau Polisi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum, maka setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dapat ditanggulangi dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, maka dalam amandemen ke-II UUD 1945 pasal 30 ayat (4) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dengan adanya amandemen ke-II UUD 1945 yang diamandemenkan pada tahun 2000 dimaksud, disahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana kedudukan Polri berada dibawah Presiden dan dipimpin

oleh Kapolri<sup>3</sup>. Pengertian Kepolisian pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian didalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Tugas dan wewenang POLRI

Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Petugas Kepolisian, maka Petugas Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menegakkan dan menertibkan kendaraan bermotor. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan ketiga tugas pokok tersebut bukan menggambarkan urutan prioritas ataupun hirarki, namun ketiganya sama penting.<sup>5</sup>

Kemudian pada pasal 14 ayat (1) menerangkan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan petroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

<sup>3</sup>Dr. Sadjijono SH,M.Hum, *Seri Hukum Kepolisian POLRI DAN GOOD GOVERNANCE*, penerbit Laksbang Mediatama, cetakan pertama juni, surabaya, 2008.

<sup>4</sup>Drs. H. Pudi Rahardi,M.H., *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI)*, penerbit Laksbang Grafika, surabaya, 2014, hlm 5.

<sup>5</sup>Drs. H. Pudi Rahardi,M.H., *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI)*, penerbit Laksbang Grafika, surabaya, 2014, hlm 69



- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan wargamasyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari bunyi pasal 14 (1) UU No. 2 Tahun 2002 diatas, menjelaskan bahwa pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi Polri untuk memberikan pengawalan dan patroli yang secara populer dikenal dengan fungsi teknis kesamaptaan Kepolisian. Disamping itu juga, memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

## **b. Tinjauan Umum Tentang Pasal 134 Huruf g**

### **1. Pengertian Konvoi**

Dalam pasal 134 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa “konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kemudian dalam penjelasan pasal 134

huruf g menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

## **2. Akibat-akibat terjadinya Konvoi di Jalan Raya**

Lalu Lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dalam hal penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka yang berperan penting dalam bidang tersebut adalah Petugas Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas (POLANTAS).

Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, maka yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran lalu lintas tersebut adalah Polantas. Namun secara umum, kewenangan-kewenangan itu tidak hanya diberikan kepada Polantas tetapi juga bagi semua anggota Polri, yang mana semua anggota Polri harus mau menindak atau minimal melakukan tindakan awal terhadap setiap pelanggaran kamtibmas atau hukum yang dilihatnya<sup>7</sup>. Karena itu operasi penegakan hukum yang dilancarkan Polri hendaknya merambah kesegala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, siapa pun yang melanggar aturan mesti kena sanksi hukum dan dikenai hukuman<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH,MA,*Polisi dan lalu lintas*, C.V. Mandar Maju,Cetakan I,bandung,1990,hlm 4.

<sup>7</sup>Anton Tabah,*Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm 81.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm.13.

Salah satu contoh konvoi yang terjadi di Indonesia adalah konvoi yang dilakukan oleh para pecinta motor gede (moge) dengan rute Jalan Raya Yogya-Solo hingga ke Prambanan pada sabtu, tanggal 15 agustus 2015. Yang meresahkan pengguna jalan lain adalah pada saat rombongan tersebut diberikan jalan oleh Polisi Lalu Lintas untuk melewati lampu merah ketika lampu Translight dalam keadaan berwarna merah, sedangkan pengendara selain rombongan tersebut dihentikan, pengendara lain (bukan dalam rombongan moge) yang mendapatkan giliran lampu hijau, terpaksa harus menunggu sampai rombongan moge selesai melewati jalan tersebut.

## **3. Latar Belakang Lahirnya Pasal 134 Huruf g**

Latar belakang lahirnya pasal 134 huruf g mengenai kata konvoi ini, sudah ada sejak di berlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam pasal 71, hanya saja untuk konvoi sendiri belum diberikan penjelasan khusus mengenai konvoi itu sendiri. Oleh karena itu, arti konvoi dimata masyarakat Indonesia masih terbilang umum artinya masyarakat masih menganggap konvoi itu hanya sekedar mendapatkan ijin dari petugas kepolisian kemudian menggunakan kendaraan bermotor lalu beramai-ramai dijalan raya dalam jumlah yang banyak.

Lahirnya pasal 134 huruf g berarti tidak terlepas dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 maka sebelum Undang-undang nomor 22 tahun 2009 ada, Undang-undang mengenai peraturan Lalu lintas sebelumnya sudah ada, yakni Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian setelah berlakunya Undang-

Undang nomor 22 tahun 2009, maka Undang-undang no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini.

### **c. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 134 Huruf g**

#### **1. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 134 Huruf g**

Pengendara sepeda motor yang masuk dalam kriteria pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu secara bersama-sama dari beberapa orang mengendarai kendaraan bermotor dengan suatu tujuan tertentu disebut konvoi adalah tidak bebas dilakukan, dalam arti, ada beberapa batasan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para peserta konvoi.

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain, harus ada surat permohonan ijin melakukan kegiatan konvoi, ada tujuan yang jelas yang ditujukan kepada daerah Kepolisian setempat. Disamping surat ijin tersebut, bagi para peserta konvoi juga harus melengkapi diri seperti pengendara motor lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu memakai pengaman kepala berupa helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terdapat dalam pasal 57 ayat (1) dan (2), surat ijin mengemudi (SIM) pasal 77 ayat (1), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) pasal 68 ayat (1). Apabila tidak terpenuhinya ketentuan diatas maka para peserta konvoi dikategorikan melanggar

Undang-Undang, sehingga polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat dapat mengambil suatu tindakan demi penegakkan hukum khususnya pada pasal 134 huruf g.

Tindakan Kepolisian terhadap pelaku pelanggaran pasal 134 huruf g atau pelaku pelanggaran konvoi di jalan raya adalah dengan memberikan informasi sekaligus sebagai sarana pendidikan mengenai syarat-syarat yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan konvoi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas kepolisian akan menerapkan sanksi yang juga serupa dengan sanksi yang diberikan kepada pengendara yang lainnya seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi administratifnya adalah pencabutan izin mengemudi dan pencabutan izin konvoi, sedangkan sanksi pidananya diberikan apabila pelaku melakukan tindakan kriminal dan tidak membawa surat izin konvoi yang dapat berupa penyitaan barang-barang (motor), dan diproses sebagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Khusus bagi yang melakukan konvoi tanpa izin dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang di jalan raya yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para peserta konvoi motor gede (moge) yang telah membuat surat permohonan ijin melalui petugas

Kepolisian, maka para peserta konvoi boleh untuk melakukan kegiatan konvoi tersebut, namun dengan pengawasan dan aturan yang diwajibkan oleh petugas Kepolisian. Tanpa adanya pengawasan dari petugas Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas), sudah pasti konvoi tersebut tidak akan berjalan dengan tertib melainkan akan memberikan dampak buruk bagi pengguna jalan lain serta bagi kepolisian itu sendiri.

Perlu adanya perhatian khusus dari petugas Kepolisian kepada para peserta konvoi. Perhatian khusus ini diperlukan agar para peserta konvoi dapat mengikuti arahan dari petugas kepolisian, karena jika tidak diberikan perhatian khusus (dalam hal ini peserta konvoi), nantinya akan terjadi kemacetan yang mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas, dikarenakan para peserta konvoi ini pastinya berjumlah relatif banyak.

Berbicara mengenai pengawasan para peserta konvoi, sudah pasti para peserta konvoi diberikan arahan agar tidak mengganggu arus lalu lintas serta pengguna jalan lain, dengan cara, para peserta konvoi tersebut dibagi dalam beberapa kloter (kelompok). 1 (satu) kloter biasanya diisikan 15 (lima belas) peserta konvoi (dalam hal ini moge) dan jarak antara 1 (satu) kloter dengan kloter yang lain, jaraknya 5 menit. Pengawasan seperti yang telah dikemukakan diatas, pastinya kegiatan konvoi tersebut akan berjalan dengan baik dan tertib.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi POLRI Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait peserta konvoi**

Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya sebetulnya tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab didalam

peraturan perundang-undang itulah tugas dan wewenang diberikan kepadanya. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam menegakkan Undang-Undang tersebut petugas kepolisian seringkali mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis saja namun juga bersifat subtansial. Kendala-kendala yang bersifat teknis ialah kendala-kendala yang berkaitan dengan penegakan ketentuan formil yang berlaku. Kendala bersifat subtansial tersebut lebih disebabkan oleh tidak diaturnya secara eksplisit persoalan-persoalan (persoalan-persoalan lalu lintas) yang terjadi. Salah satunya ialah terkait konvoi motor gede yang akhir-akhir ini sempat meresahkan masyarakat.

Meski tidak diatur secara eksplisit mengenai dibolehkannya konvoi motor gede dalam undang-undang tersebut, namun oleh pihak kepolisian melalui kewenangan diskresinya perlu untuk mengatur konvoi motor gede tersebut.

Adanya Kewenangan diskresi sebetulnya disebabkan oleh undang-undang tidak mengaturnya secara lengkap terkait persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. sehingga tujuan dari undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tidak bisa tercapai. Begitu pula dengan kewenangan diskresi bagi kepolisian, yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara lengkap persoalan-persoalan lalu lintas sehingga tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas lalu lintas tidak bisa terwujud dengan baik.

Tidak lengkapnya undang-undang tersebut disebabkan oleh karakter dari undang-undang itu sendiri lebih bersifat umum dan abstrak. J.B.J.M. ten Berge.<sup>9</sup> Menyebutkan sifat umum dan abstrak suatu undang-undang itu dicirikan oleh empat hal yaitu waktu, tempat, orang, dan fakta hukum, artinya sifat umum dan abstrak itu tidak berlaku pada saat tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.

Kendala-kendala bersifat substansial yang dimaksud terkait peserta konvoi yaitu **pertama**, sulitnya menetapkan pelaku dikarenakan sangat banyaknya para peserta konvoi dalam melakukan kegiatannya, apalagi tidak ada kordinat atau penanggung jawabnya. **Kedua**, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaksanaan konvoi terutama mengenai kelengkapan dan perizinan dalam melakukan kegiatan konvoi. **Ketiga**, masyarakat banyak yang belum memahami adanya kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan kewenangan pihak Kepolisian, sehingga sering menimbulkan pemahaman bahwa polisi berlaku tidak adil yang pada akhirnya akan timbul penilaian negatif kepada pihak Kepolisian. Penilaian negatif tersebut tidak terlepas pula dari tindakan para peserta konvoi motor gede yang seringkali tidak mengindahkan anjuran atau perintah dari pihak Kepolisian, sehingga tidak heran kalau masyarakat cenderung mempersalahkan pihak kepolisian.

Kendala-kendala seperti itulah yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dilapangan. Polisi seringkali dinilai tidak mengayomi dan melayani masyarakat dan menganggap bahwa polisi tidak bisa berperilaku adil terkait penggunaan jalan raya dalam berlalu

lintas. Pemahaman masyarakat tersebut, tidak bisa lepas dari ketidaktahuan akan kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang pihak kepolisian. Ketidaktahuan dari masyarakat itulah yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam menegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tentu masih segar dalam ingatan kita dalam kasus Elanto Wijoyono yang menghadang para peserta konvoi (moge) dilampu merah dengan menggunakan sepedanya. Menurut Elanto, “pengawalan sudah diatur di Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan hak utama menggunakan jalan. Rombongan motor tidak termasuk salah satunya”.<sup>10</sup> Tindakan Elanto Wijoyono tersebut menunjukan bahwa masyarakat dalam menilai tindakan kepolisian (Polantas) hanya dilihat dari kewenangan yang telah diatur dalam undang atau dengan kata lain masyarakat hanya melihatnya dari sisi ketentuan formilnya saja yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Jika dilihat dari 1 (satu) sisi, memang dalam hal ini petugas Kepolisian bisa saja disalahkan karena tidak mengindahkan pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi di sisi yang lain, petugas Kepolisian bisa dibenarkan, dalam hal ini mengenai “situasi” atau “keadaan tertentu”. Yang mana dalam keadaan tertentu ini, jika tidak ditangani dengan benar atau pun bahkan tidak ditangani sama sekali, maka bisa saja dapat menimbulkan dampak buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan yang panjang, tabrakan

<sup>9</sup>Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, hlm 139.

<sup>10</sup><http://www.rappler.com/indonesia/102793-yogya-elanto-menghadang-konvoi-moge>

beruntun, perkelahian di jalan raya, dan sebagainya.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan konvoi berlangsung para konvoi meskipun sudah dikawal oleh pihak kepolisian (polantas) para pengendara dalam kegiatan konvoi harus tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan tetap mengikuti instruksi atau arahan dari pihak kepolisian (polantas) agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti yang terjadi pada kasus diatas. Apabila semuanya sudah dilaksanakan dengan baik maka kegiatan konvoi bisa berjalan dengan tertib dan teratur.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 134 Huruf g adalah dengan memberitahukan syarat-syarat yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan konvoi, baik yang menyangkut surat kendaraan maupun izin untuk konvoi. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas kepolisian akan menerapkan sanksi berupa sanksi administratif dan penjatuan sanksi pidana. Sanksi administratifnya adalah pencabutan izin mengemudi dan pencabutan izin konvoi, sedangkan sanksi pidananya diberikan apabila pelaku melakukan tindakan kriminal dan tidak membawa surat izin konvoi yang dapat berupa penyitaan barang-barang (motor), dan diproses sebagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan khusus kepada para peserta konvoi yang tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh petugas kepolisian terutama dalam hal pemberian izin untuk melakukan konvoi. Pemberian izin yang dimaksud hanya sebatas untuk didahulukan dari pengguna jalan yang lain, bukan berarti membiarkan para konvoi untuk bertindak sewenang-wenang di jalan raya seperti melakukan pelanggaran lalu lintas. Terhadap mereka yang melanggar aturan lalu lintas, tetap diberikan sanksi sama seperti pengguna jalan lainnya.

b. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI (Polantas) dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait peserta konvoi adalah **pertama**, sulit menetapkan pelaku dikarenakan sangat banyaknya para peserta konvoi, apalagi tidak ada kordinat atau penanggung jawabnya. **Kedua**, kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan konvoi. **Ketiga**, masyarakat banyak yang belum memahami kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang pihak Kepolisian. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, itulah mengapa pihak Kepolisian (Polantas) sering dinilai tidak berlaku adil dalam mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya bagi pengguna jalan raya. Padahal pihak Kepolisian bertindak atas dasar kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan kewenangan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang penulis lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Polisi tidak boleh memberikan kemudahan atau kelonggaran bagi peserta konvoi untuk mendapat izin melakukan konvoi. Izin

tersebut harus diberikan berdasarkan tingkat urgensi, kepentingan dan tujuan untuk melakukan konvoi. Kalau izin tersebut diberikan hanya untuk tujuan hura-hura, sebaiknya tidak diberikan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga bagi pihak kepolisian adalah harus berlaku adil baik itu terhadap peserta konvoi motor gede maupun pengguna jalan lainnya, apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Polisi perlu melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan dalam melakukan kegiatan konvoi dan kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang yang ada pada mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak memberikan pandangan yang negatif terhadap kinerja pihak kepolisian.

c. Para peserta konvoi motor gede (moge) perlu untuk mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan tetap mengikuti instruksi dan arahan dari pihak kepolisian (polantas) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian. Apabila para peserta konvoi motor gede (moge) telah mengikuti semua instruksi dan arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka kegiatan konvoi bisa berjalan dengan tertib dan teratur.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Anton Tabah., 1991, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andi Hamzah., 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI)*, penerbit LaksBang Grafika, Surabaya.

Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *MENGENAL HUKUM KEPOLISIAN Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Soerjono Soekanto., 1990, *Polisi dan lalu lintas*, Cetakan I, C.V. Mandar Maju, Bandung.

### Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, PT Gramedia pustakautama, Jakarta.

### Jurnal :

Jimly Assiddiqie, *Makalah Mengenai Penegakan Hukum*.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

**Website:**

<http://www.ligagame.com/forum/index.php?action=printpage;topic=70316.0> diakses minggu 20 September 2015, 19.23 WIB

[www.harley-davidson-jakarta.com/motor/2015/items1.php?aidi=8](http://www.harley-davidson-jakarta.com/motor/2015/items1.php?aidi=8) diakses minggu, tanggal 20 september 2015, jam 20.45 WIB

[www.rappler.com/indonesia/102793-yogya-elanto-menghadang-konvoi-moge](http://www.rappler.com/indonesia/102793-yogya-elanto-menghadang-konvoi-moge) diakses senin 18 Januari 2016, jam 19.00 WIB